

**KEBIJAKAN CINA MENDORONG EKSPOR KE ASEAN PASCA PERJANJIAN**

*ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA TAHUN 2002-2008*

**RESUME SKRIPSI**



Oleh:

**RONALDO IZAAK FRANCISCO CORBAFO**

**151 080 359**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"**

**YOGYAKARTA**

**2012**

## **BAB**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Selama satu dekade terakhir, Cina telah tumbuh sebagai salah satu kekuatan baru yang paling berpengaruh dalam dunia internasional. Cina telah tumbuh sebagai salah satu partner dagang utama bagi kelompok negara ASEAN. Pada tahun 2005, Cina merupakan partner dagang terbesar kelima bagi ASEAN, pasar ekspor terbesar kelima, dan sumber aktifitas impor terbesar ketiga.

Pada tahun 2006, total nilai perdagangan ASEAN dan Cina mencapai 143,8 miliar Dollar AS. Persentase ekspor ASEAN ke Cina meningkat pesat dari 2,1 persen pada tahun 1995 menjadi 8,9 persen di tahun 2006.<sup>1</sup> Pada tahun 2008, nilai perdagangan ASEAN-Cina mencapai 4,3 triliun dolar AS atau setara dengan 13,3 persen volume perdagangan global. Cina saat ini merupakan mitra dagang ASEAN ketiga terbesar setelah Jepang dan Uni Eropa.<sup>2</sup>

Pada tahun 2000, Cina mengusulkan pembentukan ACFTA. Sementara perjanjian ACFTA dimulai ketika pada tahun 2001, yang pada saat itu digelar *ASEAN-China Summit* di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Pertemuan kelima antara ASEAN dengan Cina ini, menyetujui usulan Cina untuk membentuk ACFTA dalam kurun waktu 10 tahun. Lima bidang kunci yang disepakati untuk dilakukan kerjasama adalah pertanian, telekomunikasi, pengembangan sumberdaya manusia, investasi antar-

---

<sup>1</sup> Thomas Lum, Wayne M. Morrison, Bruce Vaughn, "China's Soft Power in Southeast Asia", <http://www.fas.org/sgp/crs/row/RI.34310.pdf>, diakses tanggal 7 Mei 2008.

<sup>2</sup> Faisal Basri, "ACFTA : antara Peluang dan Kekhawatiran", *Tabloid Diplomasi tahun III*, 15 Januari 2010, hlm,9.

negara dan pembangunan di sekitar area sungai Mekong. Pertemuan ini ditindaklanjuti dengan pertemuan antar Menteri Ekonomi dalam *ASEAN-China Summit* tahun 2002 di Phnom Penh, Vietnam. Pertemuan ini menyepakati “*Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation*” (CEC), yang didalamnya termasuk FTA.

Para pemimpin ASEAN beserta Cina menyetujui nota kesepahaman, yaitu *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation* untuk merealisasikan ACFTA dalam kurun waktu sepuluh tahun. Diharapkan pada tahun 2010, *Zero Tariff Barrier* antara ASEAN-6 dan Cina dapat sesuai target. Namun disitu juga diberikan ‘*differential treatment and flexibility*’ bagi negara-negara anggota yang belum berkembang di ASEAN, seperti Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam yang baru akan berlaku pada tahun 2015. Kesepakatan CEC dalam pertemuan itu mengandung tiga pilar, yaitu liberalisasi, fasilitasi dan kerjasama ekonomi. Liberalisasi meliputi perdagangan bebas barang, jasa, dan investasi dalam kawasan ACFTA. Kesepakatan CEC juga mengatur mekanisme implementasi, termasuk tata cara penyelesaian sengketa dalam perjanjian tersebut.<sup>3</sup>

Pembentukan ACFTA merupakan salah satu wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan perdagangan bebas melalui mitra wicara ASEAN, dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN, dan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi penduduknya. Setelah melalui enam tahap negosiasi, kesepuluh kepala negara ASEAN dan Cina berhasil menandatangani kesepakatan di Phnom Penh pada November 2002 guna melanjutkan program penurunan dan penghapusan tarif bea masuk

---

<sup>3</sup> “ACFTA dan Indonesia”, <http://map.ugm.ac.id/index.php/component/content/article/11-policyforum/64-acfta-dan-indonesia>, diakses pada 14 Maret 2010.

yang dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu dimulai pada 1 Januari 2004 pada tahapan awal.

Perjanjian ACFTA dipandang sebagai sebuah peluang oleh beberapa kalangan yang merasa optimis, namun disatu sisi ACFTA juga dipandang sebagai sebuah kekhawatiran bagi sebagian kalangan yang merasa pesimis. Bagi Cina, ACFTA merupakan sebuah peluang yang besar untuk memperluas pasarnya di ASEAN, dan Cina merasa optimis akan dapat meningkatkan perdagangannya dengan ASEAN. Namun demikian dari sisi negara-negara ASEAN ada kekhawatiran akan terjadinya serbuan produk-produk Cina segera setelah diberlakukannya ACFTA sehingga membuat produk lokal sulit untuk meningkatkan pangsa pasarnya, bahkan di pasar lokal.

Pada awal november 2006, Cina makin membuktikan bahwa strategi upaya merangkul ASEAN sebagai salah satu diversifikasi perdagangan luar negerinya adalah tidak sia-sia.<sup>4</sup> Pada awal November 2006 menjadi bukti bagi banyak pihak di Asia dimana Cina memberikan pinjaman khusus pada pengusaha Cina yang melakukan investasi di ASEAN dengan beban bunga khusus pula. Perdana Menteri Cina Wen Jiabao juga menepati janjinya dengan mengalokasikan 5 miliar dolar AS untuk mendorong investasi perusahaan Cina di ASEAN dan membentuk bisnis patungan ASEAN-Cina.<sup>5</sup>

Peningkatan kerjasama dan hubungan ekonomi antara Cina dan ASEAN merupakan bagian dari kebijakan *ASEAN-China Free Trade Area* yang merupakan kesepakatan diantara Cina dan ASEAN dalam mengatur kerjasama perdagangan yang saling menguntungkan. Kebijakan ini merupakan usulan pemerintahan Cina untuk memberlakukan perdagangan bebas antara ASEAN dan Cina. Cina mengusulkan suatu

---

<sup>4</sup> Joseph Stiglitz, *The Demise of Doha Talks and Its Impact On Developing Nations*, *The Jakarta Post*, tanggal 8 Agustus 2006.

<sup>5</sup> “Produk Cina Di Setisp Lini”, *Kompas* 11 April 2011, hlm 1.

kawasan perdagangan bebas dengan ASEAN dalam konsep *The China-ASEAN Free Trade Area* (CAFTA/ACFTA), yang ditargetkan akan terwujud pada tahun 2010. Tujuan dari kebijakan ini adalah penghapusan hambatan tarif dan non-tarif perdagangan secara keseluruhan menjadi 0% antara Cina dan ASEAN pada tahun 2010.

Terdapat tiga tahap pengurangan tarif dalam konsep ACFTA dengan skema *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) yaitu *Early Harvest Program* (EHP), *Normal Track*, dan *Sensitive Track* yang meliputi *Sensitive List* dan *Highly Sensitive List*. EHP adalah suatu program untuk mempercepat implementasi ACFTA dimana tarif *Most Favored Nation* (MFN) sudah dapat dihapus untuk beberapa kategori komoditas tertentu, seperti minyak kopra, kakao, kopi, dan buah-buahan. MFN adalah status yang diberikan kepada suatu negara oleh negara lain dalam suatu hubungan perdagangan. Status ini memberikan suatu negara keuntungan dalam perlakuan perdagangan dalam bentuk (misalnya) tarif rendah atau kuota impor yang lebih tinggi. Negara dengan status MFN harus memperoleh perlakuan dagang yang sama dari negara pemberi status.

*The Technical Committee Tariff and Related Matters* (TC-TRM) membentuk EHP pada tahun 2003.<sup>6</sup> Program ini meliputi pembebasan perdagangan daging, ikan, produk susu dan produk ternak lain, pohon hidup, sayuran, buah dan kacang dari semua bea masuk. Dibuat tiga kategori pengurangan dan penghapusan bea masuk yaitu negara yang mengenakan tarif diatas 15 persen, negara dengan tarif antara 5-10 persen dan negara dengan bea masuk dibawah 5 persen. Terhitung sejak Juli 2003, dalam 3 tahun bea masuk untuk semua komoditas itu harus 0 (nol). Dengan demikian, pada tahun 2006 enam negara maju ASEAN (Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, Philipina dan Thailand) sudah harus menghilangkan seluruh tarif pada komoditas yang disebutkan diatas.

---

<sup>6</sup> “ACFTA dan Indonesia”, <http://map.ugm.ac.id/>, diakses pada 14 Maret 2010

Dalam kategori komoditas yang masuk dalam *Normal Track*, tarif MFN-nya harus dihapus berdasarkan jadwal yang disepakati. Hampir seluruh komoditas masuk dalam kategori ini, kecuali dimintakan pengecualian (dengan demikian masuk kedalam *Sensitive Track*).<sup>7</sup> Penjadwalannya adalah seluruh negara sudah harus mengurangi tarif menjadi 0-5 persen untuk 40 persen komoditas yang ada pada *Normal Track* sebelum 1 Juli 2006. Seluruh negara sudah harus mampu mengurangi tarif menjadi 0-5 persen untuk 60 persen komoditas yang ada pada *Normal Track* sebelum 1 Januari 2007. Dan seluruh negara sudah harus mengurangi tarif menjadi 0-5 persen untuk 100 persen komoditas yang ada pada *Normal Track* sebelum 1 Januari 2010.

Namun pada periode 2002 hingga 2008 pasca perjanjian ACFTA disepakati atau sebelum implementasi ACFTA secara keseluruhan dilaksanakan pada tahun 2010, peningkatan dagang antara Cina dan ASEAN terjadi begitu signifikan. Berikut adalah tabel 1.2 yang menunjukkan total perdagangan antara Cina dan ASEAN dimana dalam tabel tersebut dapat dilihat peningkatan ekspor Cina ke ASEAN periode 2004 hingga 2008. Dimana pada periode tahun 2004 tepatnya setelah kesepakatan ACFTA disepakati, program penurunan tarif dalam mekanisme perjanjian ACFTA mulai dilaksanakan.

**TABEL 1.2**

**Perdagangan Negara-negara ASEAN dan Cina Periode 2004-2008**

<i>(Nilai dalam juta US\$)</i>					
Nama Negara	2004	2005	2006	2007	2008
Brunei Darussalam	243	234	174	201	0

<sup>7</sup> “Realizing The East Asia Vision”, <http://www.csis.or.id/papers/wpe090>, diakses tanggal 14 Maret 2010

Kamboja	12	15	13	11	13
Indonesia	4,605	6,662	8,344	8,897	11,637
Laos	1	4	1	35	15
Malaysia	8,643	9,465	11,391	15,443	18,422
Myanmar	75	119	133	475	499
Filiphina	2,653	4,077	4,628	5,750	5,467
Singapura	15,321	19,770	26,472	28,925	29,082
Thailand	7,098	9,083	10,840	14,873	15,931
Vietnam	2,711	2,828	3,015	3,336	4,491
<b>ASEAN Export</b>	<b>41,352</b>	<b>52,258</b>	<b>65,010</b>	<b>77,945</b>	<b>85,558</b>
Brunei Darussalam	87	94	120	157	171
Kamboja	337	430	516	653	933
Indonesia	4,101	5,843	6,637	8,616	15,247
Laos	89	185	23	43	131
Malaysia	11,353	14,361	15,543	18,897	18,646
Myanmar	351	286	397	564	671
Filiiphina	2,659	2,973	3,647	4,001	4,250
Singapura	16,137	20,527	27,185	31,908	31,583
Thailand	8,183	11,116	13,578	16,184	19,936
Vietnam	4,416	5,322	7,306	12,148	15,545
<b>ASEAN Import</b>	<b>47,714</b>	<b>61,136</b>	<b>74,951</b>	<b>93,173</b>	<b>107,114</b>

*Sumber* : ASEAN Trade Statistic Database (July 2009)

Tabel I.2 diatas juga menunjukkan bahwa total perdagangan antara Cina dan ASEAN mengalami defisit bagi ASEAN dengan nilai impor yang lebih besar dibanding ekspor ASEAN ke Cina sepanjang waktu 2004-2008. Defisit perdagangan tersebut semakin membesar dari tahun ke tahun, dari sekitar 6 miliar sampai mencapai 22 miliar dolar AS pada tahun 2008.

Berdasarkan uraian diatas, kerjasama antara Cina dan ASEAN ditandai dengan adanya peningkatan perdagangan dengan pesatnya ekspor Cina ke ASEAN yang signifikan terutama pasca perjanjian kesepakatan kawasan perdagangan bebas ASEAN

dan Cina pada tahun 2002 hingga 2008, dimana pemberlakuan atau implementasi ACFTA secara keseluruhan menjadi 0% (nol persen) baru berlaku pada tahun 2010.

### **C. Rumusan Masalah**

Melalui latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah, yaitu : "Mengapa ekspor Cina ke ASEAN meningkat pada periode 2002-2008 ketika pelaksanaan ACFTA belum mencapai tahapan 0% (nol persen) pada tahun 2010?"

## **BAB**

### **PEMBAHASAN**

Dalam menjawab rumusan masalah diatas, penulis menggunakan teori kebijakan promosi ekspor. Dalam teori kebijakan promosi ekspor di jelaskan bahwa kebijakan promosi ekspor adalah strategi yang berorientasi ke luar (*outward looking*) dengan

instrument-instrument yang dipusatkan pada kebijakan, program dan kegiatan untuk memacu ekspor barang-barang yang diproduksi di dalam negeri. Strategi ini diwujudkan dengan mewujudkan efisiensi pada setiap kegiatan ekonomi, yang mutlak diperlukan, khususnya sektor industri dan perdagangan. Efisiensi tidak hanya diperlukan pada sektor swasta, tetapi juga pada sektor pemerintahan sehingga kegiatan produksi untuk ekspor dan kegiatan ekspor tidak terhambat. Hal ini berarti bahwa bersamaan dengan efisiensi sektor produksi swasta, maka di jajaran pemerintah harus dilakukan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi secara efektif. Pemerintah dan birokrasi menjadi *partner* seiring dengan sektor swasta.

Syarat pelaksanaan strategi ekspor ini adalah kesiapan dan kemampuan untuk bersaing antara industri dalam negeri dengan industri negara lain di pasar internasional. Tujuan dari strategi ini bersifat tunggal, yakni untuk mencapai target pertumbuhan ekspor yang pesat agar mampu menghasilkan devisa yang besar bagi negara. Negara pun perlu berperan dalam membangun sistem pendukung strategi promosi ekspor. Hal terpenting dari peran negara adalah meningkatkan efisiensi biaya transaksi dengan efisiensi pelayanan (listrik, air, telepon), perbaikan, perijinan, dan sebagainya. Kepabeanan dan pelabuhan adalah unsur penting yang menjadi sasaran utama agar jalur ekspor dan impor barang berjalan lancar. Negara juga dapat menciptakan insentif untuk pengusaha dengan memberikan fasilitas kredit ekspor yang lebih murah dalam proses produksi. Di samping itu pula pemerintah berperan aktif, ikut serta dalam mencari peluang pasar yang luas di berbagai negara tujuan ekspor.<sup>8</sup>

Strategi ini dimaksudkan untuk memacu akselerasi pertumbuhan industri manufaktur dalam negeri untuk tujuan ekspor. Pasar internasional sangat luas dengan

---

<sup>8</sup> Didik J. Rachbini, *Ekonomi Politik : Kebijakan dan Strategi Pembangunan*, Edisi I, Jakarta, Granit, 2004.

peluang yang sangat besar. Syarat utama agar dapat melakukan penetrasi pasar internasional ini adalah efisiensi dan mampu bersaing dari segi kualitas dan harga. Selain itu juga harus memiliki jaringan yang kuat di berbagai negara. Strategi promosi ekspor menggiring industri manufaktur di dalam negeri ke arah persaingan pasar internasional tadi sehingga industri yang dipilih bersifat kompetitif dan memiliki keunggulan komparatif yang jelas.

Pemerintah tidak perlu mengeluarkan kebijakan proteksi terhadap industri-industri yang dikembangkan oleh pihak swasta karena tujuannya jelas, yakni bersaing di pasar internasional. Industri yang masih memerlukan proteksi dengan alasan apapun dianggap tidak layak di kembangkan. Kalangan swasta dipersilahkan untuk mengimpor kebutuhan dalam negeri yang tidak dapat diproduksi oleh industri dalam negeri sehingga harganya lebih murah dibandingkan bila memproduksi barang itu di dalam negeri sendiri.

Pertimbangan untuk menerapkan strategi promosi ekspor diantaranya adalah strategi tersebut memungkinkan terciptanya arus modal internasional dan jaringan pertukaran ketrampilan, teknologi dan manajemen. Strategi tersebut juga akan menciptakan kesempatan kerja lebih besar dibandingkan dengan strategi substitusi impor. Di sisi lain mengalirnya arus modal internasional ke negara-negara berkembang karena: (1) modal internasional mencari daerah investasi di negara-negara dimana upah buruh masih murah, dan (2) adanya teknologi pada proses produksi untuk barang-barang tertentu yang memungkinkan pembagian kerja internasional (*international division of labour*) di bawah suatu atap produksi.

Pertumbuhan ekonomi Cina yang fantastis, didukung pula oleh strategi pemerintahan Cina untuk lebih *outward looking*, terutama dalam aktifitas perekonomian

dan perdagangan internasional. Pergeseran kondisi perekonomian Cina dari negara penghasil industri primer menjadi negara industri manufaktur hanya berlangsung dalam waktu yang relatif singkat, yaitu sepuluh tahun.

Pada tahun 1980, kontribusi sektor industri manufaktur terhadap perolehan ekspor berada pada kisaran 45 persen, lebih rendah dibandingkan kontribusi industri primer yang mencapai 55 persen, namun pada tahun 1990, perolehan ekspor dari sektor industri primer hanya mencapai 10 persen pada tahun 2000.<sup>9</sup> Cina sudah tercatat sebagai produsen perangkat televisi terbesar sejak 1995, serta menempati urutan tertinggi sebagai penghasil pupuk buatan dan baja pada tahun 1998.<sup>10</sup> Sementara ekspor produk manufaktur Cina dalam bidang TFC (*Textile, clothing, footwear*), mainan anak-anak, dan alat olah raga cenderung mengalami penurunan, dan digantikan oleh ekspor produk-produk elektronik dan mesin.

Ada lima kebijakan penting yang selanjutnya memberikan signifikansi bagi pertumbuhan ekonomi Cina, yaitu (1) mendorong pembangunan *non-state enterprise* (NSE) dengan menciptakan lingkungan usaha yang kondusif; (2) perusahaan-perusahaan milik negara harus tunduk pada ketentuan pemerintah, tidak memiliki hak-hak istimewa; (3) menekankan prinsip non-diskriminasi dalam memperlakukan segala sektor kegiatan perekonomian; (4) mereformasi aturan hukum yang tidak sinergis dengan aturan-aturan WTO; dan (5) mengutamakan prinsip ekonomi, politik, keadilan sosial, dan kepentingan umum. Kesadaran pemerintah dalam menyesuaikan diri dengan arus globalisasi ekonomi, tidak menjadikan Cina serta merta ‘tunduk’ terhadap kebijakan negara-negara barat. Selain itu pula proses produksi yang begitu besar dan memacu pertumbuhan ekspor yang

---

<sup>9</sup> Ignatius Wibowo, *Belajar Dari Cina: Bagaimana Cina Merebut Peluang dalam Era Globalisasi*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2005, hlm.32.

<sup>10</sup> *Ibid.*

pesat juga tidak terlepas dari spesialisasi tenaga kerja yang ditinjau dari upah tenaga kerja yang begitu murah sehingga pertimbangan realokasi industri tersebut bukan didorong oleh faktor bahan baku, melainkan dengan pertimbangan terutama tenaga kerja murah dan tuntutan lingkungan yang rendah.

Hal penting lainnya, yang perlu diperhatikan adalah kesadaran Cina bahwa negara merupakan *key factor* dalam menentukan arah perekonomian nasional.<sup>11</sup> Selain merumuskan berbagai kebijakan mendasar sebagai upaya untuk meningkatkan struktur perekonomiannya, pemerintah Cina juga melaksanakan reformasi di berbagai bidang dengan tetap mengedepankan peran pemerintah. Pertama, melaksanakan reformasi pada berbagai badan usaha milik pemerintah (*state-owned enterprise/SOE*), yaitu antara lain dengan mentransformasi struktur tradisional SOE menjadi perusahaan modern berorientasi pasar, namun tetap memprioritaskan negara (pemerintah) sebagai pengambil keputusan utama.

Kedua, mendorong pembangunan *non-state enterprise* (NSE) di tingkat kota madya dan pedesaan sebagai motor penggerak perekonomian nasional. Ketiga, mengembangkan UMKM (Usaha, mikro, kecil dan menengah) dengan memaksimalkan kemampuan manajerial UMKM untuk mendorong dan mengoptimalkan pendapatan dan tingkat produktifitas. NSE bersama-sama dengan sektor UMKM di Cina telah memainkan peranan penting sebagai akselerator perbaikan ekonomi, juga sebagai penyedia lapangan pekerjaan dan basis inovasi. Keempat, reformasi sistem perbankan melalui restrukturisasi sistem keuangan yang konsisten, modern, sinergis, dengan ekonomi pasar.

---

<sup>11</sup> Zainuddin Djafar, "Implementasi Kesepakatan ACFTA", <http://www.kompas.com/kompas-cetak/123456.htm>, diakses tanggal 1 Januari 2011.

Dua pertiga aktifitas perekonomian Cina didominasi oleh sektor UKM. Sektor UMKM Cina juga telah diakui secara internasional sebagai bagian penting dari *global supply chain*. Pesatnya pengembangan UMKM di Cina didukung pula oleh sumber daya manusia (SDM) yang handal, karena hampir semua lulusan universitas di negara tersebut sangat antusias untuk turut serta secara langsung sebagai praktisi UMKM. Ada satu konsep penting mengenai perekonomian Cina, yaitu *matched and stimulated*. Meskipun kemajuan Cina belum dapat menyaingi Amerika dan Jepang, Cina dapat mengantisipasi perubahan sistem ekonomi internasional, dan dapat memposisikan diri dengan baik sebagai *key player* dalam perdagangan global.

Salah satu cara memperkuat perekonomian nasional dan efisiensi ekonomi adalah melalui FDI (*Foreign Direct Investment*). Pemerintah Cina melakukan perbaikan agar tidak terjadi 'perpindahan' investasi asing langsung tersebut ke negara lain. Upaya-upaya tersebut, antara lain; pertama, Cina terus memperbaiki kebijakan *legal enviroment* untuk investor asing, termasuk memelihara stabilitas, kontinuitas, dan predikibilitas. Kedua, pemerintah Cina memelihara dan memperbaiki terus *fair and open market enviroment, break local protection, and trade monopolies, protect intellectual property rights, and crack down piracy*. Ketiga, Cina juga melakukan *open trade in service*. Keempat, mendorong para investor asing untuk melakukan investasi di bidang industri *hi-tech, basic industries, dan supporting industries*. Kelima, terus melakukan pendekatan untuk mendorong MNC (*Multi national Corporation*) dunia melakukan investasinya ke Cina, dan mendorong perluasan dan penggalakan investasi ke wilayah pusat dan barat wilayah Cina.

Pemerintah Cina menganggap bahwa FDI tidak hanya memberikan kontribusi bagi negara dan pembangunan negara, namun juga meningkatkan efisiensi dan kompetisi ekonomi melalui kompetisi pasar. Oleh sebab itu dalam menghadapi pasar ASEAN yang begitu kompleks, terlebih setelah kesepakatan kerjasama kawasan yang terbentuk dalam kerangka ACFTA, Cina terus berupaya memperbaiki sektor-sektor vital agar investor-investor ASEAN tertarik dalam penanaman modalnya di Cina. Perbaikan-perbaikan di Cina juga diupayakan melalui perbaikan sarana dan prasarana kegiatan bisnis, seperti infrastruktur dan beberapa hal lain yang telah dijelaskan sebelumnya.

Untuk menampung masuknya perusahaan-perusahaan manca negara yang akan mengekspor barang-barang yang sudah dirakit, negara-negara berkembang membuka kawasan perdagangan bebas (*free trade zones*) atau kawasan proses ekspor (*export procesing zones*). Dalam prakteknya penerimaan yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan ekspor hanya berupa nilai ekivalen pembayaran terhadap pekerja-pekerja lokal dan pembelian-pembelian lokal oleh perusahaan tersebut, karena ekspor yang dilakukan sebetulnya merupakan *subcontracting export* dari perusahaan luar negeri kepada afiliasinya di negara-negara lain. Dengan demikian manfaat nilai ekspor yang dinikmati oleh negara-negara tersebut sangat kecil.

Pengembangan zona ekonomi dan kawasan pertumbuhan juga semakin intens dilakukan pemerintah Cina dalam upaya menyerap dana asing dan mendorong peningkatan ekspor. Zona pengembangan ini mencoba selalu mengembangkan industri-industri baru dan *hi-tech* yang berorientasi ekspor dengan konsentrasi pada industri manufaktur modern. Pusat-pusat litbang industri *hi-tech* pun terus bertambah. Pembangunan terpadu berbasis industri baru terus bertumbuh. Selain tingkat nasional,

zona pengembangan dibuat juga di tingkat propinsi dan yang lebih rendah dari propinsi. Jenis zona-zona pun datang dengan spesialisasi masing-masing. Akibatnya, skala volume dan nilai ekspor Cina meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini pula yang mendorong peningkatan produktivitas yang menyebabkan pesatnya ekspor Cina ke kawasan Asia Tenggara, khususnya pasca perjanjian ACFTA pada tahun 2002 silam.

Dalam upaya menjangkau pasar-pasar ASEAN dalam kerangka ACFTA sebagai salah satu cara Cina dalam penguatan pasar internasional, pemerintah terus melakukan hubungan dan kerjasama yang kokoh dengan ASEAN melalui kerjasama-kerjasama dan kesepakatan-kesepakatan yang dapat mendorong intensitas pertumbuhan ekonomi bagi Cina sendiri. Beberapa kerjasama antara Cina dan ASEAN dalam kerangka ACFTA juga semakin intens dilakukan, antara lain melalui kesepakatan perdagangan barang, jasa, investasi dan kerjasama disektor privat, seperti *ASEAN-China Expo*. Kerjasama ini merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan Cina untuk memperbesar akses pasar masing-masing pihak tanpa harus ada berbagai kesulitan maupun hambatan perdagangan. Dalam upaya penguatan pasar di kawasan Asia Tenggara dalam kerangka ACFTA, Cina juga banyak melakukan penyelenggaraan dagang internasional dan penerapan kebijakan go global.

Pembangunan pesat Cina menjanjikan keuntungan karena pasti membutuhkan bahan baku dan energi dari negara-negara ASEAN. Selain pasar bahan baku, Cina juga merupakan pasar potensial bagi produk-produk dari ASEAN. Namun, kebutuhan nyata untuk menopang integrasi ekonomi dan perdagangan bebas tampaknya belum sejelas dan sekuat kebutuhan riil Cina. Sebagai produsen bahan baku dan energi negara ASEAN

akan diuntungkan, tetapi sebagai produsen barang-barang manufaktur, Cina akan lebih diuntungkan daripada ASEAN.<sup>12</sup>

## **BAB**

## **PENUTUP**

---

<sup>12</sup> Rene L. Pattiradjawane, "China Sebagai Jangkar Regionalisme", *Kompas*, 19 Desember 2005.

Cina terbilang sukses dalam mendorong ekspor ke ASEAN melalui strategi promosi ekspornya. Keberhasilan Cina tersebut jelas tidak terlepas dari peran pemerintah Cina dalam mereformasi segala sektor kehidupannya dalam mewujudkan peningkatan ekspor ke ASEAN dalam kerangka ACFTA. Persiapan Cina sudah dilakukan sejak reformasi keterbukaan yang di cetuskan pada tahun 1978 oleh Deng Xiaoping, sejak saat itulah Cina merombak sistem perekonomiannya menjadi sistem ekonomi yang terbuka.

Salah satu upaya yang dilakukan Cina dalam merealisasikan pertumbuhan ekonomi Cina yang signifikan ditandai dengan peningkatan ekspor Cina ke ASEAN adalah melalui jalan menarik FDI (*Foreign Direct Investment*). Salah satu upayanya adalah dengan menciptakan zona-zona ekonomi yang kemudian mengantar Cina sebagai negara pengekspor terbesar bersama negara adidaya Amerika Serikat.

Disamping itu Cina juga berhasil dalam membangun kerjasama-kerjasama yang dibangun dengan ASEAN dalam kerangka ACFTA, oleh karena itu kerjasama-kerjasama yang pada prinsipnya memudahkan proses ekspor Cina ke ASEAN telah menjadi salah satu strategi Cina dalam menjangkau pasar- pasar ASEAN. Keberhasilan Cina juga tidak terlepas dari begitu besarnya peran pemerintah Cina dalam mendorong internasionalisasi perusahaan dalam mendorong ekspor dalam negeri. Dengan internasionalisasi perusahaan diharapkan perusahaan-perusahaan Cina yang berinvestasi di ASEAN dapat dijadikan sebagai sarana transfer teknologi dan sebagai basis produksi bagi perusahaan dalam negeri yang mengalami *overstock* produksi.